

Perluasan Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perkotaan Jabodetabek Sebuah Ancaman Bagi Perwujudan Green Development ?

Endrawati Fatimah
Jurusan Teknik Planologi, FALTL, Universitas Trisakti,
Email: indo_googolendra@yahoo.com

ABSTRAK

Kawasan Perkotaan Jabodetabek merupakan magnet yang kuat bagi pengembangan investasi di bidang ekonomi. Sebagai sebuah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan kota intinya adalah DKI Jakarta, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini sulit dikendalikan. Kegiatan ekonomi yang dominan di kawasan ini adalah perdagangan dan jasa serta industri yang membawa konsekuensi pada pesatnya pertumbuhan perumahan perkotaan. Dalam satu decade terakhir, proses intensifikasi kawasan perkotaan di Jabodetabek mulai diikuti dengan adanya proses ekstensifikasi yang sudah melebar hingga melampaui Kabupaten Bekasi menuju ke kabupaten Karawang dan Purwakarta. Kedua kabupaten ini terletak di DAS Citarum yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat Jabodetabek sebagai pemasok air baku serta PLTA.

Perluasan kegiatan ekonomi hingga ke wilayah kabupaten Karawang dan Purwakarta ini menyebabkan berkurangnya lahan-lahan pertanian sawah produktif yang memiliki nilai penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pada periode 2000 – 2010, hasil identifikasi pengurangan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi menunjukkan sejumlah 303 ha/tahun, Kabupaten Karawang sebesar 113 ha/tahun, sementara Kabupaten Purwakarta sebesar 62 ha/tahun. Selain terjadinya pengurangan lahan pertanian, di 3 kabupaten tersebut terjadi pula berkurangnya hutan yang berfungsi sebagai resapan air sebesar 55 ha/tahun.

Di satu sisi pengembangan ekonomi perkotaan mampu meningkatkan PDRB wilayah namun apabila tidak terkendali pengembangan ini merupakan ancaman bagi terwujudnya Green Development di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Makalah ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang masalah lingkungan yang sudah, sedang dan akan muncul di kemudian hari akibat tidak terkendalinya perluasan dan pertumbuhan kawasan Jabodetabek dan sekitarnya.

Kata Kunci: *perkotaan, alih fungsi lahan, kegiatan ekonomi perkotaan, masalah lingkungan*

PENDAHULUAN

Kawasan perkotaan Jabodetabek memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Kawasan ini mencakup 3 wilayah propinsi yaitu DKI Jakarta, sebagian Banten dan sebagian Jawa Barat. DKI Jakarta yang merupakan kota inti Jabodetabek merupakan ibukota Negara. Selain itu, di kawasan ini terletak Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Pelabuhan Laut Internasional Tanjung Priok yang merupakan pusat pelayanan transportasi primer yang diperkirakan mengendalikan sekitar 60% aktivitas ekspor-impor nasional. Kawasan Jabodetabek juga mengendalikan lebih dari 85% pengambilan keputusan yang terkait dengan 85% atau lebih masalah-masalah keuangan nasional (Kemenko Ekuin, 2011).

Dalam system penataan ruang nasional, Kawasan Perkotaan Jabodetabek ditetapkan melalui PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang memiliki nilai strategis secara ekonomi. Sebagai operasionalisasi dari RTRWN, telah pula ditetapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Dalam Peraturan Presiden tersebut, cakupan wilayah Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan sebagian Kabupaten Cianjur yaitu kecamatan Cugenang, Pacet, Sukaresmi dan Cipanas yang sering disebut kawasan Puncak. Kawasan ini dimasukkan dalam deliniasi ruang dalam Peraturan Presiden tersebut karena berkaitan dengan pengaruh dan keterkaitannya secara hidrologis dengan kawasan Jabodetabek.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011, Pemerintah menetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang disusun dalam rangka memberikan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia guna mewujudkan visi pembangunan tahun 2025. Dalam MP3EI, kawasan Jabodetabek merupakan bagian dari program utama pengembangan kawasan strategis serta menjadi salah satu dari 22 kegiatan ekonomi utama dalam MP3EI. Cakupan wilayah Jabodetabek Area sebagai satu kesatuan system pengembangan wilayah yang bersifat strategis diperluas ke arah Timur antara lain mencakup Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Jabodetabek Area termasuk dalam pengembangan Koridor Jawa yang memiliki tema pembangunan sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan fungsi/peranan penting Jabodetabek sebagai pusat ekonomi nasional akan makin diperkuat guna mendorong, mempercepat dan menimbulkan multiplier pengembangan ekonomi secara nasional.

Mengingat pentingnya peranan kawasan Jabodetabek, maka fungsi strategis kawasan terutama dari aspek ekonomi perlu dijamin keberlangsungannya. Menurut Samuelson (1995) ada 4 (empat) factor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yaitu factor sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal dan perubahan teknologi dan inovasi. Penelitian ini akan memfokuskan pada faktor sumberdaya alam, yang dalam kaitannya dengan karakteristik pola perkembangan ekonomi di Jabodetabek mencakup sumberdaya lahan dan sumberdaya air yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi berbasis perkotaan.

Transformasi kegiatan ekonomi ke arah industrialisasi akan membawa dampak pada terjadinya perubahan bahkan penurunan kualitas tata ruang dan tata air. Di lain pihak, ketersediaan sumberdaya lahan dan air merupakan factor penentu bagi pertumbuhan ekonomi. Sumberdaya lahan berfungsi sebagai tempat produksi dan bermukim penduduk, sementara sumberdaya air dapat berfungsi sebagai sumberdaya untuk produksi, konsumsi air bersih dan pembangkit tenaga listrik. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pengaruh perkembangan kawasan perkotaan dan kegiatan ekonomi di Jabodetabek terhadap daya dukung sumberdaya air dan lahan untuk menunjukkan perlunya mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebagai pembatas bagi pertumbuhan ekonomi.

TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pola perkembangan kawasan perkotaan Jabodetabek khususnya ke arah Kabupaten Karawang dan Purwakarta
2. Mengidentifikasi ancaman tidak terkendalinya perkembangan dan perluasan kawasan perkotaan Jabodetabek ke arah Kabupaten Karawang dan Purwakarta terhadap keberlangsungan fungsi strategis DAS Citarum sebagai pendukung kehidupan ekonomi Jabodetabek dan sekitarnya

METODOLOGI

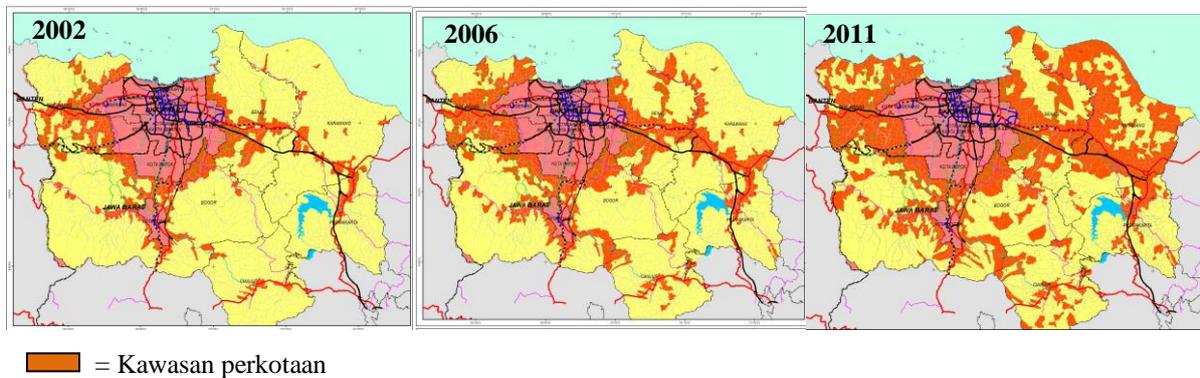
Metode analisis yang digunakan untuk menentukan pola perkembangan kawasan perkotaan dilakukan dengan cara mengklasifikasi masing satuan unit wilayah desa berdasarkan pada Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia (Peraturan Kepala BPS Nomor 37/2010) dan dengan menggunakan data Podes tahun 2002, 2006 dan 2010. Selain itu, metode analisis spasial juga digunakan untuk mengidentifikasi pola kecenderungan perubahan kegiatan ekonomi dengan menganalisis pola perubahan lahan. Sementara, perkiraan ancaman keberlangsungan fungsi DAS Citarum akibat perluasan kawasan perkotaan dibahas dengan menggunakan metode analisis hubungan sebab akibat berdasarkan pendekatan teoritis.

HASIL DAN ANALISIS

A. Pola Perkembangan Kawasan Jabodetabek dan sekitarnya

Terbentuknya kawasan perkotaan Jabodetabek dalam konteks pengembangan wilayah sebenarnya terjadi sebagai bentuk perluasan (ekstensifikasi) wilayah DKI Jakarta dalam

artian perluasan aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Daya tarik yang dimiliki DKI Jakarta dan adanya keterbatasan ruang yang tersedia membawa pengaruh terhadap perkembangan kota dan kabupaten di sekitarnya. Pada akhirnya terbentuk suatu keterkaitan yang cukup tinggi antara DKI Jakarta dan wilayah di sekitarnya yang menciptakan suatu sistem perkotaan yang menyatu, saling terkait dan memusat dengan DKI Jakarta sebagai kota inti sehingga terjadi kondisi dimana pembangunan sudah tidak dapat dipisahkan secara fisik. Dalam perkembangannya, kondisi ini makin berlanjut seperti yang terlihat pada Gambar 1. yang menunjukkan hasil identifikasi perkembangan kawasan perkotaan Jabodetabek dan sekitarnya pada 2002, 2006 dan 2011

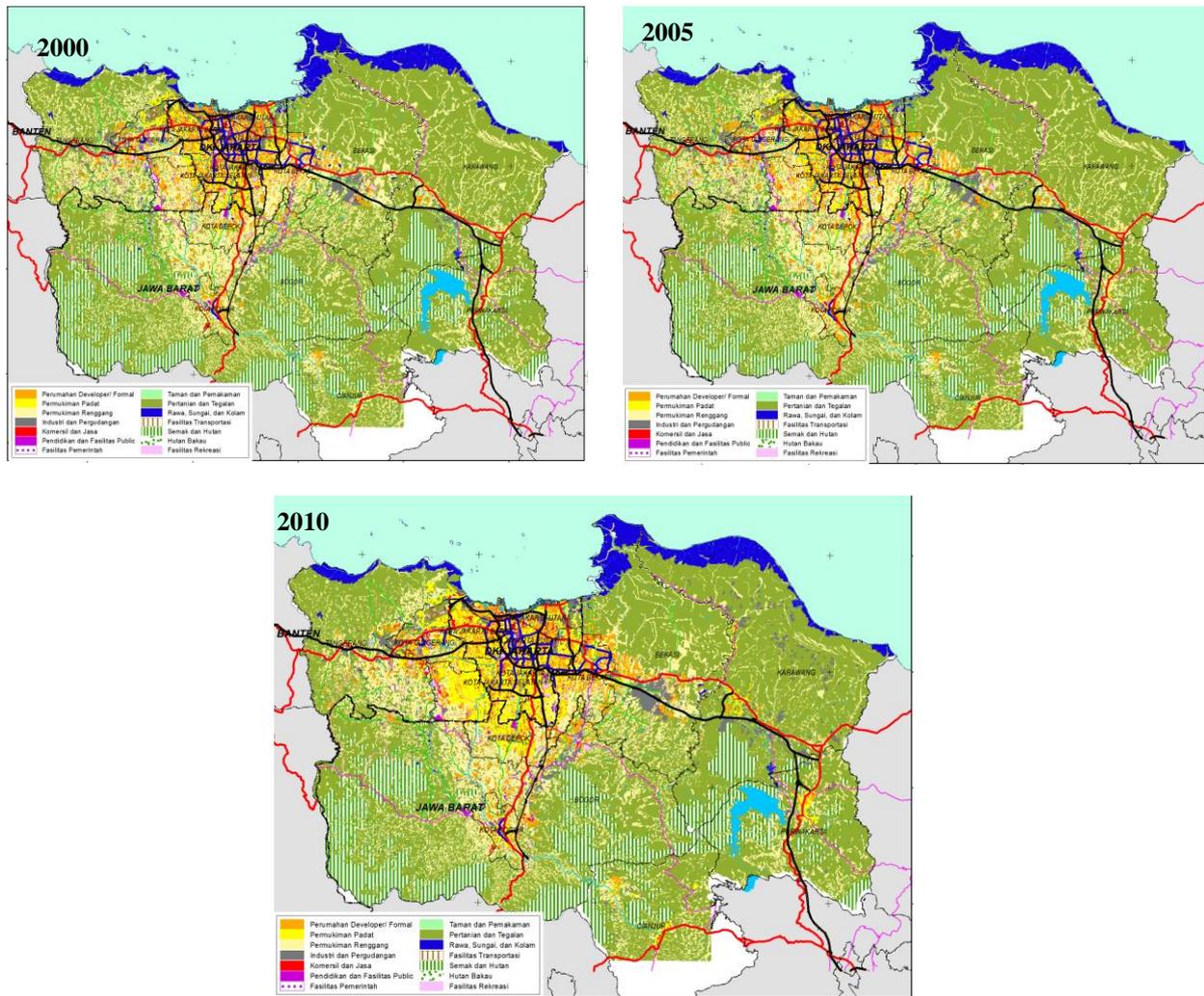


Gambar 1. Pola Perkembangan Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan sekitarnya
Sumber: Fatimah, E. dkk, 2012

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2002, perkembangan kawasan perkotaan masih terkonsentrasi di dalam deliniasi wilayah Jabodetabek. Perkembangan ke arah Timur yaitu ke Kerawang Purwakarta masih berbentuk linier sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek dan Tol Cipularang. Pada tahun 2006, dimana terlihat kawasan Jabodetabek arah Timur Barat sudah hampir seluruhnya berupa kawasan perkotaan, perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya pergerakan yang lebih melebar dan mengarah ke sebelah Utara jalan Tol mengikuti aliran sungai Citarum (perbatasan kab Bekasi dan Karawang). Saat ini, pengaruh perluasan interaksi aktifitas ekonomi Jabodetabek membawa konsekuensi pada perluasan kawasan perkotaan yang makin melebar tidak sebatas hanya di wilayah Jabodetabek namun hampir terjadi di seluruh Kabupaten Karawang. Perkembangan perkotaan ke arah Kabupaten Purwakarta saat ini belum menunjukkan adanya percepatan yang signifikan. Kondisi ini diperkirakan berkaitan dengan batasan geografis yang dimiliki Kabupaten Purwakarta berkaitan dengan kemiringan lahan yang bergelombang. Namun demikian, kondisi kemiringan lahan yang

ini justru bukan menjadi batasan pada perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Cianjur terutama kawasan Puncak. Kawasan perkotaan di wilayah ini pada tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan terkait dengan adanya perkembangan perumahan perkotaan yang dibangun developer dengan konsep rumah peristirahatan.

Perkembangan kawasan perkotaan tersebut dapat pula diidentifikasi melalui analisis perubahan guna lahan yang terjadi dari tahun 2000, 2005, 2010.



Gambar 2 Tata Guna Lahan Jabodetabekjur dan sekitarnya tahun 2000, 2005, 2010
Sumber: Fatimah, E. dkk, 2012

Secara lebih rinci perubahan penggunaan lahan tersebut disajikan dalam tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ada peningkatan penggunaan lahan yang paling besar adalah untuk kegiatan perumahan (padat dan developer) yaitu sekitar 31.000 ha (rata-rata 3.100 ha/tahun), dan kegiatan industri dan perdagangan sekitar 8.000 ha (rata-rata 800 ha/tahun). Sementara penurunan penggunaan lahan terbesar adalah

untuk kegiatan perumahan renggang (perdesaan) yang berdasarkan observasi lapangan sebagian besar tetap sebagai peruntukan perumahan hanya berubah menjadi perumahan developer atau perumahan padat. Penurunan penggunaan lahan pertanian dan tegalan di kawasan ini sangat besar yaitu berkisar 23.500 ha (rata-rata 2350 ha/tahun), diikuti dengan penggunaan lahan berupa rawa, sungai dan kolam berkisar 1.300 ha (rata-rata 130 ha/tahun) dan semak/hutan berkisar 530 ha (53 ha/tahun).

Tabel 1. Perubahan Penggunaan Lahan Jabodetabekpunjur termasuk Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta tahun 2000 – 2010

Code	Landuse Category	Area (Ha)			
		2000	2005	2010	Converting
21	Perumahan Developer/ Formal	36,808.80	40,945.29	47,477.60	10,668.80
22	Permukiman Padat	24,906.59	26,893.32	45,555.66	20,649.07
23	Permukiman Renggang	164,827.75	160,155.73	140,597.39	(24,230.36)
24	Industri dan Pergudangan	18,862.65	20,620.04	26,915.94	8,053.28
25	Komersil dan Jasa	5,596.18	5,664.25	9,311.76	3,715.58
26	Pendidikan dan Fasilitas Public	2,785.99	2,777.85	5,240.66	2,454.67
27	Fasilitas Pemerintah	836.80	841.28	2,328.16	1,491.37
28	Taman dan Pemakaman	987.12	999.38	3,800.74	2,813.62
29	Pertanian dan Tegalan	589,221.70	587,018.18	565,739.12	(23,482.58)
30	Rawa, Sungai, dan Kolam	54,516.95	53,623.44	53,230.27	(1,286.67)
31	Fasilitas Transportasi	1,495.71	1,493.74	1,407.88	(87.83)
32	Semak dan Hutan	133,904.43	133,787.04	133,369.79	(534.64)
33	Hutan Bakau	358.05	243.42	358.02	(0.03)
34	Tanah Berbatu	27.01	27.01	27.01	-
35	Fasilitas Rekreasi	2669.14	2,718.34	3537.66	868.52
0	No Landuse Code	133.92	133.68	13.34	(120.58)

Sumber: Fatimah, E. dkk, 2012

Secara spesifik, hasil analisis spasial terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 2, 3 dan 4. Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi (masih termasuk kawasan Jabodetabek) menunjukkan penurunan luasan lahan pertanian dan tegalan yang sangat besar yaitu berkisar 330 ha/tahun, diikuti dengan menurunnya luasan rawa, sungai dan kolam yaitu sebesar 34 ha dan luasan hutan dan semak sebesar 18,7 ha. Sebaliknya, terjadi peningkatan luasan perumahan developer maupun permukiman padat yang cukup signifikan. Peningkatan kebutuhan perumahan yang tinggi ini terjadi untuk memenuhi limpahan jumlah penduduk yang tidak lagi tertampung di DKI Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Dari segi lokasi, Kabupaten Bekasi memiliki daya tarik bagi komuter karena tersedianya aksesibilitas transportasi yang relatif mudah (dengan kereta api dan bus AKAP), masih tersedianya lahan dan dengan harga lahan yang relatif lebih murah.

Tabel 2 Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Bekasi Tahun 2000-2010

Penggunaan Lahan	Luas Area (ha)			Rata-rata Perubahan/tahun
	2000	2010	Perubahan 2000-2010	
Perumahan Developer/Formal	2,060.04	4,387.18	2327.14	232.7
Permukiman Padat	834.3	2,035.28	1200.98	120.1
Permukiman Renggang	22,532.04	20,652.57	(1879.47)	(187.9)
Industri dan Pergudangan	3,958.76	5,640.36	1681.60	168.2
Komersil dan Jasa	112.22	201.38	89.16	8.9
Pendidikan dan Fasilitas Publik	6.87	47.46	40.59	4.1
Fasilitas Pemerintah	3.49	161.12	157.63	15.8
Taman dan Pemakaman	5.46	3.88	(1.58)	(0.2)
Pertanian dan Tegalan	83,883.86	80,850.41	(3033.45)	(303.3)
Rawa, Sungai dan Kolam	12,808.86	12,468.27	(340.59)	(34.1)
Fasilitas Transportasi	38.83	38.85	0.02	0.0
Semak dan Hutan	226.19	38.83	(187.36)	(18.7)
Hutan Bakau		226.19	226.19	22.6
Fasilitas Rekreasi	176.84	176.84	0.00	0.0

Sumber: Hasil Interpretasi Peta

Tabel 3 Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2000-2010

Penggunaan Lahan	Luas Area (ha)				Rata-rata Perubahan/tahun
	2000	2005	2010	Perubahan 2000-2010	
Perumahan Developer/Formal	145.57	170.54	355.49	209.92	21.0
Permukiman Padat	468.47	641.24	1,331.49	863.02	86.3
Permukiman Renggang	8,896.22	8,622.24	7,957.38	(938.84)	(93.9)
Industri dan Pergudangan	236.72	542.73	742.87	506.15	50.6
Komersil dan Jasa	84.98	104.98	112.16	27.18	2.7
Fasilitas Pemerintah	22.88	28.12	28.12	5.24	0.5
Taman dan Pemakaman	25.76	25.76	25.76	0.00	0.0
Pertanian dan Tegalan	59,979.35	59,724.31	59,357.54	(621.81)	(62.2)
Rawa, Sungai dan Kolam	7,577.37	7,577.37	7,577.37	0.00	0.0
Fasilitas Transportasi	0.36	0.36	7.29	6.93	0.7
Semak dan Hutan	17,724.04	17,724.04	17,666.31	(57.73)	(5.8)

Sumber: Hasil Interpretasi Peta

Tabel 4 Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Karawang Tahun 2000-2010

Penggunaan Lahan	Luas Area (ha)				Rata-rata Perubahan/tahun
	2000	2005	2010	Perubahan 2000-2010	
Perumahan Developer/Formal	821.18	821.18	982.57	161.39	16.1
Permukiman Padat	169.54	409.51	2,478.23	2308.69	230.9
Permukiman Renggang	18,057.57	17,817.60	15,829.23	(2228.34)	(222.8)
Industri dan Pergudangan	1,199.03	1,480.57	2,206.89	1007.86	100.8
Komersil dan Jasa	130.04	130.04	130.04	0.00	0.0
Fasilitas Pemerintah	44.57	44.57	44.57	0.00	0.0
Pertanian dan Tegalan	135,590.21	135,308.68	134,459.05	(1131.16)	(113.1)
Rawa, Sungai dan Kolam	20,604.39	20,604.39	20,604.39	0.00	0.0
Semak dan Hutan	16,221.66	16,221.66	15,906.42	(315.24)	(31.5)
Hutan Bakau	123.10	123.1	123.10	0.00	0.0
Fasilitas Rekreasi			262.20	262.20	26.2

Sumber: Hasil Interpretasi Peta

Sementara itu, penurunan luas lahan pertanian dan tegalan serta semak dan hutan juga mulai terjadi di Kabupaten Karawang dan Purwakarta yang sebenarnya tidak termasuk dalam kawasan Jabodetabek berdasarkan PerPres 54/2008. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh daya tarik DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sudah

meluas melampaui batas kawasan perkotaan Jabodetabek. Perkembangan Kabupaten Karawang dan Purwakarta juga menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang terjadi masih memusat di DKI Jakarta. Pola perubahan lahan di kedua kabupaten ini mengikuti pola perkembangan jalan tol Jakarta – Cikampek dan Cipularang. Khusus untuk Kabupaten Karawang, ada kecenderungan pergerakan alih fungsi menjadi kawasan industri ke arah Utara mengikuti pola aliran Sungai Citarum. Hampir seluruh alih fungsi lahan pertanian adalah untuk kegiatan industri dan kegiatan permukiman perkotaan karena memang keduanya memerlukan kemudahan aksesibilitas dari dan menuju kota inti dimana kegiatan perkenomian terpusat, dan terletak pelabuhan serta bandar udara. Dari tabel 2 – 3 dapat dilihat bahwa, alih peruntukan lahan pertanian di Kabupaten Karawang yang lokasinya berbatasan dengan kawasan Jabodetabek (Kabupaten Bekasi) adalah sekitar 113 ha/tahun atau lebih kecil dari Kabupaten Bekasi (303 ha/tahun) dan sebaliknya lebih besar dari Kabupaten Purwakarta (62,2 ha /tahun) yang notabene terletak di sebelah Tenggara Kabupaten Karawang.

B. Perkembangan Mega Urban Jabodetabek sebuah Ancaman bagi Perwujudan Green Regional Development

Pembangunan perekonomian suatu wilayah dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Meskipun demikian, seringkali pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana menimbulkan berbagai dampak negatif terutama bagi lingkungan. Didasarkan pada hal tersebut, muncullah konsep Green Economy yang mengetengahkan sekaligus 3 (tiga) tujuan pembangunan yaitu 1) pemulihan kondisi ekonomi, 2) pengentasan kemiskinan dan 3) mengurangi emisi karbon serta degradasi lingkungan. Ketiga hal tersebut tercakup dalam pengertian dari Green Economy menurut UNEP, 2011 *“An economy that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities.”*(United Nation, 2011).

Berdasarkan data PDRB kabupaten /Kota tahun 2011 dan dengan menggunakan metode analisis tipologi Klassen dapat diketahui bahwa perkembangan Kabupaten Karawang dan Bekasi termasuk dalam kategori daerah yang Maju dan Cepat Tumbuh, jika diperbandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jabodetabekjur. Kondisi ini dapat terjadi akibat adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari pertanian ke kegiatan industri

Tabel 5 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota/Kabupaten di Jabodetabekjur dan sekitarnya

PDRB / KAPITA	$Y_k > Y_w$	$Y_k < Y_w$
LAJU PERTUMBUHAN PDRB		
Gk > Gw	Maju dan Cepat Tumbuh <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bekasi • Kab. Karawang 	Berkembang Cepat <ul style="list-style-type: none"> • Kab Tangerang Selatan • Kota Tangerang
Gk < Gw	Maju tapi Tertekan <ul style="list-style-type: none"> • Kodya Jak. Barat • Kodya Jak. Timur • Kodya Jak. Selatan • Kodya Jak. Utara • Kodya Jak. Pusat • Kab. Kep Seribu • Kota Tangerang 	Relatif Tertinggal <ul style="list-style-type: none"> • Kota Bogor • Kota Depok • Kota Bekasi • Kab. Bogor • Kab. Cianjur • Kab. Purwakarta

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Namun demikian, dampak langsung akibat meningkatnya intensitas kegiatan perekonomian non pertanian adalah alih fungsi pemanfaatan lahan dari pertanian ke industry dan permukiman perkotaan. Berlangsungnya fenomena penyusutan luas tanah pertanian di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta menunjukkan bahwa dinamika berkembangnya perekonomian wilayah menyebabkan perubahan penggunaan tanah menjadi semakin intensif. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya proses transformasi struktur ekonomi yang terjadi di ketiga kabupaten ini yakni dari yang berbasis sektor primer (pertanian) menuju perubahan terutama ke arah sektor sekunder (industri). Pertumbuhan penduduk kawasan perkotaan dan aktivitas perekonomian yang makin meluas memerlukan penambahan luasan tanah untuk perumahan, industri, sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sementara, dengan luas lahan yang relatif tetap dan cenderung mengikuti mekanisme pasar, lahan pertanian makin terdesak untuk beralih fungsi menjadi non pertanian. Padahal, penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta akan membawa pengaruh pada pasokan beras secara nasional karena wilayah ini merupakan salah satu lumbung beras nasional. Kegiatan industri dan permukiman di kawasan ini juga menyebabkan penyusutan maupun kerusakan hutan serta badan air yang secara hidrologis akan mempengaruhi kualitas DAS Citarum.

Di sisi lain, keberlangsungan kegiatan sosial ekonomi Kawasan Jabodetabek dan sekitarnya sangat bergantung pada kondisi daya dukung DAS Citarum yang merupakan DAS terbesar di Jawa Barat. DAS Citarum memiliki nilai sangat strategis dalam mendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta karena salah satunya dalam DAS ini terdapat 3 (tiga) Waduk, yaitu Waduk Cirata, waduk Saguling dan Waduk Jatiluhur. Ketiga waduk tersebut memiliki kontribusi yang

besar sebagai sumber pemasok kebutuhan penyediaan energi listrik dan penyediaan air bersih baik untuk kegiatan domestik, maupun non domestik dalam lingkup wilayah DAS itu maupun di luar wilayah termasuk DKI Jakarta. Cakupan wilayah DAS Citarum meliputi wilayah administrasi Kota Bandung, dan 8 kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur, Bogor, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Sumedang dan Bandung. Dari potensi sumberdaya air DAS Citarum yang ada yaitu sebesar 13 milyar m³/tahun, saat ini baru dimanfaatkan sekitar 7,5 milyar m³/tahun (57,9%) untuk keperluan irigasi pertanian 86,7% yang mengairi 298.000 ha sawah di pantura, Industri 2%, Air Minum DKI Jakarta 6%, Air minum lokal 0,3%. Selain itu, PLTA di 3 (tiga) Waduk yang ada di DAS Citarum mampu menghasilkan 700 MW untuk Waduk Saguling, 1000 MW untuk Waduk Cirata dan 187,5 MW untuk Waduk Jatiluhur (BBWS Citarum, 2011).

Perubahan lahan yang terjadi dalam dekade terakhir ini ternyata telah berdampak negative pada kualitas daya dukung DAS Citarum. Menurunnya kualitas DAS Citarum yang ditengarai karena makin tingginya intensitas kegiatan ekonomi, bukan hanya sebagai akibat dari perkembangan kawasan perkotaan Jabodetabek saja, melainkan juga adanya kontribusi perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi perkotaan di wilayah Bandung Metropolitan Area yang terletak di bagian hulu DAS. Dengan kata lain, kedua kawasan metropolitan area ini (Jabodetabek dan Bandung dan sekitarnya) sama-sama memiliki ketergantungan terhadap SDA DAS Citarum, namun di lain pihak juga berkontribusi menurunkan kualitas daya dukung DAS dengan adanya pengalihfungsian lahan yang cenderung tak terkendali.

Penurunan kualitas DAS Citarum saat ini sudah menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan seperti yang dirangkum dari berbagai sumber, yaitu:

1. Sekitar 20% luas DAS Citarum Bagian Hulu atau wilayah Cekungan Bandung saat ini diklasifikasikan sebagai lahan kritis. Kerusakan DAS di bagian hulu ini karena hilangnya tutupan lahan berupa hutan menyebabkan sering terjadinya erosi dan tanah longsor. yang selanjutnya berdampak pada tingginya sedimentasi di badan air air termasuk ke jaringan prasarana air (BBWS Citarum, 2011)
2. Tingginya erosi di bagian hulu menyebabkan laju sedimentasi di Waduk Saguling (1988-2009) mencapai 8,2 juta m³/tahun, sedimentasi di Waduk Cirata (1988-1997) 6,4 juta m³/tahun dan di Waduk Jatiluhur (1987-1997) 1,6 juta m³/tahun. Kondisi ini cenderung menunjukkan peningkatan (BBWS Citarum, 2011)

3. Intrusi air laut sudah terjadi di sepanjang Sungai Citarum Hilir yaitu wilayah Karawang dan Indramayu. Di daerah pesisir Karawang peresapan air asin secara setempat telah mencapai ke arah daratan antara 7 sampai 15 km dari garis pantai. Air tanah dangkal dengan kedalaman kurang dari 3 meter sudah tercemar air asin (ASER 2008, BPLHD Jawa Barat)
4. Tidak terkendalinya pengambilan air tanah juga menyebabkan Penurunan muka air tanah secara drastis terutama terjadi di Cekungan Bandung yang mencapai penurunan sekitar 2 – 5 m per tahun (ASER 2008, BPLHD Jawa Barat).
5. Sedangkan penurunan muka tanah di daerah Citarum yang cukup padat dengan permukiman dan industri, mencapai 10 cm tiap tahunnya akibat pengambilan air tanah secara masif. (Pusat Komunikasi Publik Dep PU, 4 Maret 2010).
6. Sungai Citarum sudah masuk dalam kategori sungai dengan tingkat pencemaran berat. Data dari Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2010 menyebutkan bahwa tidak satu segmen sungai memenuhi kriteria mutu air kelas II. Tingginya kandungan koli tinja, oksigen terlarut, BOD, COD dan zat tersuspensi terdapat pada semua lokasi. Beberapa lokasi menunjukkan parameter oksigen terlarut yang merupakan indikator kesegaran air mencapai nol.

Dengan adanya MP3EI, kecenderungan perluasan dan perkembangan kawasan Jabodetabek ini sepertinya justru didorong untuk makin berkembang dengan menetapkan beberapa kegiatan antara lain di wilayah Banten untuk pengembangan industri makanan minuman dan peralatan transportasi, di Bogor untuk pengembangan industri peralatan transportasi dan di Bekasi dan sekitarnya (termasuk Karawang dan Purwakarta) untuk pengembangan peralatan transportasi dan makanan minuman serta DKI Jakarta sebagai pusat jasa skala nasional. Sementara, dalam Koridor Ekonomi (KE) yang sama yaitu KE Jawa, kota Bandung dan sekitarnya atau Bandung Metropolitan Area juga ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Ekonomi Pulau Jawa dengan fokus pengembangan industri alutsista dan tekstil. Selain itu, untuk mendukung perkembangan industri yang direncanakan, MP3EI juga mencanangkan adanya investasi untuk pengembangan pelabuhan laut ekspor impor di daerah Cilamaya yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Karawang dan merupakan wilayah hilir DAS Citarum. Di kabupaten Karawang juga ada wacana untuk pembangunan bandar udara internasional. Kedua prasarana ekspor impor skala internasional ini dikawatirkan akan makin mendesak keberadaan lahan

pertanian subur di kabupaten Karawang, dan meningkatkan perubahan guna lahan ke arah kabupaten Purwakarta.

Kondisi tersebut akan menjadi suatu ancaman besar jika perkembangannya makin berlanjut baik ke arah Timur Karawang (Kabupaten Subang, dll) dan ke arah Selatan Purwakarta, hingga akhirnya kedua metropolitan yaitu Jabodetabek dan Bandung secara fisik menjadi sulit dipisahkan. Dengan menyatunya kedua metropolitan berbagai permasalahan perkotaan akan makin meluas dan makin kompleks. Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa pengendalian perubahan lahan hijau antara lain dengan:

1. Melakukan pengendalian terhadap perubahan guna lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang yang berbasis DAS (bioregion) agar kualitas daya dukung dapat dijamin keberlangsungannya. Beberapa hal yang perlu diprioritaskan dalam menentukan rencana pola ruang antara lain:
 - a. Tetap mempertahankan Kabupaten Purwakarta sebagai green buffer bagi metropolitan Jabodetabek dan Bandung;
 - b. Tetap mempertahankan lahan pertanian terutama lahan pertanian irigasi teknis
2. Menggalakkan terwujudnya kerjasama antar pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya alam
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam melaksanakan upaya pelestarian lingkungan
4. Meningkatkan produktifitas pertanian melalui inovasi teknologi
5. Membatasi pengembangan industri yang berbasis sumberdaya air
6. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya lahan dengan cara pemilihan industri yang hemat lahan
7. Melakukan rehabilitasi lahan kritis dan merevitalisasi kawasan lindung
8. Meningkatkan kualitas air sungai melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan
9. Memberlakukan prinsip green industry dan green housing untuk peruntukan dalam kawasan

KESIMPULAN

Upaya untuk mendorong perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia tahun 2025 seperti dicanangkan dalam MP3EI memang perlu dilaksanakan. Namun demikian, perluasan dan percepatan perkembangan ekonomi di kawasan Jabodetabek dan Bandung perlu dilakukan dengan mempertimbangkan telah

terjadinya konsentrasi ekonomi nasional di wilayah ini dan mempertimbangkan kondisi daya dukung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui. Dalam tahapan pelaksanaannya, seyogyanya pelaksanaan MP3EI memfokuskan pada perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi di wilayah luar Jawa yang saat ini jauh tertinggal, sekaligus untuk mengurangi terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di Pulau Jawa khususnya di DKI Jakarta. Pada akhirnya, inovasi teknologi yang diperlukan dalam rangka pengembangan kawasan Jabodetabek dan sekitarnya lebih diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas lingkungan serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya air dan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- ____ Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN
- ____ Peraturan Presiden No. 57 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur
- ____ Peraturan Presiden No 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
- Arrow, K., B. Bolin, R. Costanza, P. Dasgupta, C. Folke, C.S. Holing, B. Jansson, S. Levin, K. Maler, C. Perrings, dan D. P. 1995. *Economic Growth, Carrying Capacity And The Environment, Journal Science*. Vol 268. 28 April 1995.
- Badan Pengelolaan DAS Ciliwung Citarum, 2007. *Rencana Detil Penanganan Banjir di Wilayah JABODETABEKJUR*, BPDAS Ciliwung
- BBWS Citarum, 2007 Profil BBWS Citarum, Departemen Pekerjaan Umum
- BPLHD Jawa Barat, 2010 Status Lingkungan Hidup Jawa Barat tahun 2010
- BPS, 2011. Status Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta
- Fatimah, E., 2009. *Pengembangan Model Daya Dukung Lingkungan Untuk Keberlanjutan Kota (Kajian Daya Dukung Sumberdaya Air dan Lahan di kota Bekasi, Jawa Barat)*, Disertasi Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.
- Fatimah, E. 2010 *Keberlanjutan Pembangunan Kota Dilandasi Daya Dukung Lingkungan*, di dalam *Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21: Konsep dan pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, B.T.S. Soegijoko et.al (eds), URDI, Jakarta
- Fatimah., E. A. Sitawati, M. Sintorini, M. Lindu, 2012 *Pengembangan Sinergitas Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Jabodetabek Menuju Keberhasilan Pelaksanaan MP3EI*, Laporan Penelitian Prioritas Nasional MP3EI 2011 – 2025, USAKTI
- Kemenko, 2011 Master Plan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, 1992, *Macroeconomics*, Fourteenth Edition, McGraw-Hill Inc.
- United Nation, 2011 *Working Toward a Balanced and Inclusive Green Economy: A United Nation System-Wide Perspective*, United Nation, Genewa